

## Daftar Pustaka

- Aditya, Dina Mei Eka, & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Provinsi/Wilayah Kalimantan dan Sulawesi). *Prosiding SENDI\_U 2018*, 33, 631–639.
- Ali, A., -, K., & Desita, P. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010 – 2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1).
- Ambya, A. (2020). *Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah ( Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru )*.
- Asli, P., & Pad, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015).
- Ayu, 2018. ANALISIS RASIO PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN GOWA. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar.
- Bratakusumah, D. S. (2000). *Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah*. 20, 1–7.
- Chodariyanti, L. (2015). Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *JURNAL EKBIS*.
- Ekowati, L., Cathryna, R. B. S., Listiawati, R., Akuntansi, J., & Jakarta, P. N. (2010). Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Depok Wilayah Provinsi Jawa Barat Lia. *Akuntansi*, 1–6.
- Hadi, S. (2009). Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999 - 2004). *JESP*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Haryanto, J. T. (2018). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahu 2011-2015). *Inovasi*.
- Hasan, P. F. (2016). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Wacana Kinerja*, 17(November), 218–240.
- Husna, U. (2015). *Se Jawa Tengah*. 2–61.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. *E-Jurnal Manajemen*, 45(Supplement), S-102.
- Koibur, M. M., Pangemanan, S., & Sabijono, H. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*.
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *SNA XV Banjarmasin*, 32, 1–20.
- L, G. A. (2016). *Terhadap Belanja Modal*. 7(2005), 692–702.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. In *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Nugroho, Prayudi (2015) Analisis Kemandirian Pemda dalam Mengelola Keuangan. *Jurnal Pusdiklat Pengembangan SDM, STAN*, Vol.3 No.1, Juni 2015.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pujawati, P., Badri, H., & Agustiani, E. (2019). Disparitas Antara Kebutuhan Dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. *None*.

Sriyana, J. (2009). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul. *Unisia*.

Sudibya, K. P. (2020). *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali*. 143–155.

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146–157.

Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Widani, C. I. K., & Erawati, N. M. A. (2016). PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Wijaya, D. (2015). *Analisis Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi*. 3(1), 11–18.